

**SKRIPSI**

**ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DANAU TEMPE DI  
KAB. WAJO**

Disusun dan diajukan oleh:

**DILA JUARTI**

**E051171505**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DANAU TEMPE DI KABUPATEN WAJO

Disusun dan diajukan oleh:

**Dila Juarti**

**E 051 171 505**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Pada Tanggal 30 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si  
NIP. 190601123 298603 2 001

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Indar Arifin, M.Si  
NIP. 19630407 198903 2 003

**Mengetahui,**

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



DR. H. A. M. Rusli, M.Si  
NIP. 19640727 199103 1001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**

**ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PESISIR DANAU TEMPE DI KABUPATEN WAJO**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Dila Juarti**

**E 051 171 505**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik

**Makassar, 30 April 2023**

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si  
Sekertaris : Dr. Indar Arifin, M.Si  
Anggota : Ashar Prawitno, S.IP, M.Si  
Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Pembimbing utama : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si

Pembimbing pendamping : Dr. Indar Arifin, M.Si



Handwritten signatures of the exam committee members and supervisors, arranged vertically on the right side of the page.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dila Juarti  
NIM : E051171505  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

### **Analisis Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Danau Tempe di Kabupaten Wajo.**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 April 2023

Yang Menyatakan

  
DILA JUARTI

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Wajo.”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, Tak lupa pula shalawat dan salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadisuri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi masih terdapat kekurangan, dan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang istimewa dengan penuh cinta kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Amiruddin yang telah berkorban sedemikian banyak untuk penulis berada dititik ini, Mendiang ibu penulis,

Megawati yang menjadi penyemangat penulis menyelesaikan kuliah dengan baik. Terima kasih pula kepada ketiga kakak penulis Jasmil, Aswidiah S,P, dan Leo adri atas doa dan dukungan secara fisik, materi dan waktu kepada penulis, kedua adik saya Dita Melisa dan Difa ardani yang selalu menyemangati penulis agar cepat menyelesaikan studi, semoga kita bisa menggapai cita-cita agar mampu membahagiakan dan membanggakan kedua orangtua, Aamiin.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
3. Dr. A. M. Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. Ibu Prof. Dr. Hj Rabina Yunus, M.Si selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, selaku pembimbing pendamping yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan, petunjuk serta bantuan dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si, dan Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, selaku tim penguji yang telah memberikan masukan, kritikan serta perbaikan atas penulisan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin khususnya Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis, yaitu Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si, Bapak Prof, Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj Rabina Yunus, M.Si, Ibu Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si , Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si, Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si, dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan Universitas Hasanuddin;

7. Pak Mursalim, S.IP, Selaku Staf Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membantu penulis dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Para informan dalam penulisan skripsi ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapak Ir. H Nasfari, Sekretaris Dinas Kelautan dan perikanan Ibu Dra, Asriati mannaungi, M.Si, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bapak Panca Batman, S.Pi, Penyuluh lapangan Besse Emmi, S.Pi, Bapak Camat Majauleng Drs. M. Jaya Ekaputra, Bapak Sekretaris Kecamatan Tanasitolo Mappedasse, S.Sos M.Si, Bapak Setretaris Kecamatan Tempe Faried Wajedi, S.IP, Bapak Andi Muhammad Subhan, Lurah Laelo Ibu Masniati, S.Sos, Seksi Penanganan Lurah Laelo Ibu Asri sinring, Bapak Lambau serta masyarakat nelayan yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuannya untuk mendapatkan data,

informasi, dan melakukan wawancara;

9. Kepada teman angkatan Ilmu Pemerintahan 2017 saudara-saudari teman seperjuangan penulis: Tamara, Ulfa, Nelvi, Evi, Yuyu, Sabrina, Syarifah, Aurel, Nisa, Widy, Enil, Maulida, Ilmi, Astri, Anna, Arimbi, Ayuma, Raja, Alam, Hardiansyah, Taslim, Windi, Ulfi, Ongkel, Onco, Ibnu, Adhe, Bahrul, Dandis, Wawan, Ari, Farhan, Razak, Fadel, Fikri, Dan Fikri Fahreza yang telah kebersamai mulai dari mahasiswa baru hingga penyelesaian skripsi ini bersama membantu penulis dalam keadaan suka maupun duka selama dibangku kuliah;
10. *Save the next*; Are, Uni, Nanda, Widya, dan Liana, yang selalu menemani dan menyemangati penulis. Meski kadang pertengkaran terjadi dan saling mendiamkan, Namun pada akhirnya itu pula yang menguatkan, terima kasih atas dukungan yang tak henti-hentinya dan pengalaman berharga selama kost bersama;
11. *Since 2012*; Ana, Inci, Dianita, Uni Dan Mina, sahabat penulis yang terus menyemangati, memberikan bantuan, menemani penulis meneliti, terima kasih sudah menemani perjalanan hingga sekarang.
12. *Sahabat D'east*; Nurul, Saada, Uul, Thahirah, Ainun Dan Dini, Sahabat penulis yang terus memantau perkembangan tugas akhir penulis, memberikan ide-ide dalam penyusunan skripsi, terima kasih senantiasa menemani dan membantu penulis hingga saat ini.

13. UKM Pencak Silat Panca Suci FISIP Unhas yang telah memberikan ruang untuk bergabung dan memberikan ilmu, menjadi bagian dari proses berkembang dan belajar penulis.

14. Andi Aliefka, Achdar Quraesy, Andi Aprilia dan teman teman KKN Wajo 4 lainnya yang telah memberikan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

15. Akbar Ali Burang yang telah menemani penulis dalam proses penulisan penyusunan proposal hingga sampai ke tahap ini. Terima kasih telah menyemangati terus menerus untuk menyelesaikan skripsi ini, selalu bersabar menjaga, dan membantu dalam pengurusan administratif dan keperluan penulis, selalu ada membersamai, menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi rekomendasi untuk selanjutnya.

Makassar, 30 April 2023

Dila Juarti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Fungsi Pemerintah Daerah.....	10
2.1.1 Fungsi Pemerintah .....	10
2.1.2 Pemerintah Daerah .....	13
2.2 Pemberdayaan .....	23
2.3 Masyarakat Pesisir Danau.....	36
2.4 Kerangka konsep.....	43

<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	45
3.2. Lokasi Penelitian .....	45
3.3. Fokus Penelitian .....	46
3.4. Sumber data .....	47
3.5. Teknik pengumpulan data .....	48
3.5.1. Wawancara .....	49
3.5.2. Dokumentasi .....	51
3.5.3. Observasi .....	51
3.6. Analisis data .....	51
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo .....	55
4.1.1. Visi Misi Kabupaten Wajo .....	55
4.1.2. Kondisi geografis Kabupaten Wajo .....	58
4.1.3 Penduduk .....	61
4.1.4. Tenaga Kerja .....	63
4.1.5 Sosial .....	65
4.2. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan .....	69
4.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	69
4.3. Gambaran Umum Kecamatan Sabbangparu .....	90
4.3.1. Kondisi Fisik Wilayah .....	90
4.3.2 Penggunaan lahan .....	91
4.3.3 Kependudukan .....	91

4.4. Gambaran Umum Kecamatan Tempe .....	94
4.4.1. Kondisi Fisik Wilayah.....	94
4.4.2. Kependudukan.....	95
4.5. Gambaran Umum Kecamatan Tanasitolo .....	98
4.5.1. Kondisi Fisik Wilayah.....	98
4.5.2. Kependudukan.....	99
4.6. Gambaran Umum Kecamatan Majauleng .....	101
4.6.1. Kondisi Fisik Wilayah.....	101
4.6.2. Kependudukan.....	102
4.7. Gambaran Umum Kawasan Danau Tempe .....	105
4.7.1. Sejarah Danau Tempe.....	105
4.7.2. Kondisi Fisik Wilayah Danau Tempe .....	108
4.8 Hasil Pembahasan .....	111
4.8.1. Fungsi Pemerintah Daerah.....	111
4.8.1.1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.....	115
4.8.1.2 Pelaksanaan Bimbingan Untuk Peningkatan Produksi Danau dan Perikanan .....	120
4.8.1.3 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.....	123
4.8.1.4 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Alat Tangkap.....	129
4.8.1.5 Pengawasan Penangkapan Ikan .....	133
Matrik 1. Analisis Fungsi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Masyarakat pesisir Danau Tempe di Kabupaten Wajo .....	138

4.8.2. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Danau Tempe .....	142
Matrik 2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan Masyarakat pesisir Danau Tempe di Kabupaten Wajo .....	146
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>150</b>
5.1 Kesimpulan .....	150
5.2 Saran .....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>153</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produksi dan nilai produksi laut dan perairan umum....	26
Tabel 1.2. Jumlah Masyarakat Miskin 2018-2020 Kabupaten Wajo.....	28
Tabel 4. Kondisi spesifik Masyarakat pesisir.....	36
Tabel 4.1 Luas daerah dan jumlah pulau menurut Kecamatan di Kabupaten wajo, 2019.....	60
Tabel 4.3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Kegiatan di Kabupaten Wajo, 2020.....	62
Tabel 4.4. Jumlah status pendidikan 2018-2020 di Kabupaten Wajo.....	65
Tabel 4.5. Persentase penggunaan jenis KB di Kabupaten Wajo 2020.....	66
Tabel 4.6 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wajo.....	68
Tabel 4.7 Distribusi kepadatan penduduk menurut Desa Kelurahan Kecamatan Sabbangparu 2020.....	91
Tabel 4.8 Jumlah penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Desa/kelurahan di Kecamatan Sabbangparu 2020.....	93
Tabel 4.9 Distribusi kepadatan penduduk menurut Desa Kelurahan Kecamatan Tempe 2020.....	97
Tabel 4.10 Jumlah penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Desa/kelurahan di Kecamatan Tempe 2020.....	98

Tabel 4.11 Distribusi kepadatan penduduk menurut Desa Kelurahan Kecamatan Tanasitolo 2020.....	100
Tabel 4.12 Jumlah penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Desa/kelurahan di Kecamatan Tanasitolo 2020.....	102
Tabel 4.13 Distribusi kepadatan penduduk menurut Desa Kelurahan Kecamatan Majauleng 2020.....	104
Tabel 4.14 Jumlah penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Desa/kelurahan di Kecamatan Majauleng 2020.....	106
Tabel 4.15. Daftar program dan kegiatan rencana kerja perangkat daerah tahun 2021.....	115
Tabel 4.16. Jumlah Nelayan Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo.....	118
Tabel 4.17 Daftar nama penyuluh dan Wilayah Kerja 2021....	126
Tabel 4.18 Jumlah bantuan mesin kompresor Dinas Kelautan dan perikanan 2018-2020.....	130

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	44
Gambar 4.1 Wilayah perairan Danau Tempe.....	110

## **ABSTRAK**

DILA JUARTI, Nomor Induk Mahasiswa E051171505, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Analisis Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Danau Tempe di Kabupaten Wajo (Dibimbing oleh Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si dan Dr. Indar Arifin, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan pemerintah daerah terhadap masyarakat pesisir danau tempe di Kabupaten Wajo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penggambaran dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan data dan fakta masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir danau tempe di Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa program pemerintah daerah dalam hal ini Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Wajo dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir danau tempe belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti iklim dan cuaca, dan pola kebiasaan buruk masyarakat nelayan yang dinilai menghambat proses program Dinas Kelautan dan perikanan berjalan dengan lancar.

## **ABSTRACT**

DILA JUARTI, Student Identification Number E051171505, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiling a Thesis with the Title: Analysis of the Function of Local Government in Empowering Tempe Lake Coastal Communities in Wajo Regency (Guided by Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si and Dr. Indar Arifin, M.Si.

This study aims to determine how local governments to empower for Tempe lake coastal communities in Wajo Regency.

The type of research used is a descriptive qualitative type of research, which is a depiction and classification of a phenomenon or social reality by describing data and facts related to the problem and unit under study. This study aims to provide a clear picture of the function of local government in empowering tempe lake coastal communities in Wajo Regency.

The results of this study show that several local government programs, in this case, the Marine and Fisheries Service of Wajo Regency to empower the coastal communities of Lake Tempe, have not run optimally. This is due to several influencing factors, such as climate and weather, the bad habits of fishing communities, and misconceptions that are considered to hinder the process of the Marine and Fisheries Service program from running smoothly.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan pemerintah dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan rakyatnya, karena adanya pemerintah akan membuat masyarakat di wilayah tersebut memiliki tujuan yang akan membawa pada perdamaian dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Pemerintah memiliki makna yang sangat penting dalam suatu negara, kedaulatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah memiliki tujuan yang mengedepankan rakyat seperti dalam meningkatkan kesejahteraan dan kerukunan.

Secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah negara modern, di samping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (*power*) untuk menjalankan pemerintah guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya.

Pemerintah dapat dipahami melalui dua pengertian; di satu pihak dalam arti "fungsi pemerintahan" (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti "organisasi pemerintahan" (kumpulan dari kesatuan kesatuan

pemerintahan). Fungsi pemerintah ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan pemerintahan; keputusan-keputusan, ketetapan ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan tindakan nyata. Pemerintah berasal dari kata perintah yakni menyuruh melakukan sesuatu (Hadjon, 2008:270)

Rasyid (2000:59), Fungsi-fungsi Pemerintah secara umum berkenaan dengan fungsi : Pengaturan (*regulation*), Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), Pembangunan (*development*)

Franklin D Rosevelt, Rasyid dalam Muhadam (2006) mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahnya. Artinya fungsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, serta pemberdayaan membuahkan kemandirian.

Fungsi pemberdayaan pemerintah adalah berbagai inovasi dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai penggerak disertai sumber daya alam sebagai pendukung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan menuju kemandirian. Salah satu kebijakan pemerintah yang digunakan dalam mengimplementasikan fungsi pemberdayaan adalah mengatur perekonomian rakyat.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dianggap penting karena dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan kemandirian dan keleluasaan pada rakyat dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Sutoro Eko, 2002)

Salah satu daerah yang mengalami kendala fungsi pemberdayaan adalah Kabupaten Wajo terkait Peraturan Daerah No.14 Tahun 2016 tentang pengolahan Danau Tempe. Perda ini hadir karena sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan sebuah potensi yang besar setelah persawahan di Kabupaten Wajo dan merupakan sumber pendapatan dan kehidupan masyarakat daerah pesisir Kabupaten Wajo. pemanfaatan sumber daya Kelautan dan perikanan untuk memenuhi kehidupan ekonomi masyarakat juga tidak terlepas dengan kondisi lingkungan yang ada. kualitas lingkungan sangat mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.

Danau merupakan salah satu bentuk ekosistem yang menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan laut dan daratan. Bagi manusia, kepentingan danau jauh lebih berarti dibandingkan dengan luas daerahnya. Indonesia memiliki lebih dari 700

danau dengan luas keseluruhan lebih dari 5000 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0.25% luas daratan Indonesia (Asnil dkk, 2011:1)

Danau Tempe yang terletak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan dan sumber mata pencaharian penduduk kota Sengkang khususnya masyarakat sekitarnya. Di wilayah ini, sebagian besar masyarakatnya hidup dari mengelola sumberdaya pesisir dan air tawar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pada masyarakat pesisir ini mata pencahariannya tersusun dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragam, seperti nelayan, petani, pedagang ikan, pemilik toko, serta pelaku industri kecil dan menengah pengolahan hasil tangkap.

**Tabel 1. Produksi Dan Nilai Produksi Laut dan Perairan Umum 2021**

NO	KECAMATAN	PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	KETERANGAN
	<b>A. DANAU</b>			
1.	SABBANGPARU	4,277.43	166,709,572.68	
2.	TEMPE	4,374.92	174,491,581.10	
3.	MANIANGPAJO	1,184.36	49,203,004.40	
4.	TANASITOLO	4,483.95	176,330,510.32	
5.	BELAWA	4,428.64	174,627,308.59	
	JUMLAH	18,749.30	741,361,977.09	
	<b>B. RAWA</b>			
1.	TEMPE	708.55	20,495,364,745	
2.	PAMMANA	1,025.03	29,440,696,740	

1	2	3	4	4
3.	BOLA	602.94	15,971,908,955	
4.	BELAWA	986.46	28,165,913,130	
5.	TAKKALALLA	368.61	8,615,876,695	
6.	PENRANG	100.71	1,536,945,525	
7.	MAJAULENG	1,035.30	29,077,816,150	
	JUMLAH	4,827.60	133,304,521,940	
	<b>C. SUNGAI</b>			
1.	SABBANGPARU	24.26	428,103,000	
2.	TEMPE	24.33	420,077,730	
3.	PAMMANA	25.63	498,182,525	
4.	BOLA	16.41	340,148,955	
5.	MAJAULENG	17.34	371,260,200	
6.	TANASITOLU	22.95	425,250,220	
7.	BELAWA	23.98	428,713,530	
	<b>JUMLAH</b>	<b>154.90</b>	<b>2,911,736,160</b>	
	<b>TOTAL PERAIRAN UMUM</b>	<b>23,731.80</b>	<b>136,957,620,077</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>44,442.10</b>		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo 2021

Tabel 1 menunjukkan, sektor perikanan di Kabupaten Wajo pada tahun 2020 mampu menghasilkan 44 ribu kilogram yang diantaranya danau tempe menyumbang 18 ribu kilogram. Hal ini pula yang menjadikan faktor utama mata pencaharian dominan setelah bertani di Kabupaten Wajo yaitu nelayan.

Realitasnya, masyarakat kawasan Danau Tempe yang bermukim di pinggiran danau seringkali diasumsikan dengan kondisi ekonomi yang belum sejahtera dan kesehatan lingkungan yang belum layak, serta

pendidikan yang masih rendah. Dinamika masyarakat dengan kompleksitas masalah yang dihadapi membutuhkan strategi komprehensif untuk dapat menyelesaikan masalah masyarakat kawasan Danau Tempe.

Kemiskinan masih saja menjadi persoalan bagi kehidupan masyarakat nelayan. Selama beberapa dekade, gambaran nelayan umumnya masih saja miskin dengan rumah-rumah kumuh, hidup jauh dari berkecukupan, sementara usaha perikanan sendiri atau usaha lain yang terkait dengan sektor kelautan tak banyak yang berjalan baik (Kusnadi, 2003:24)

**Tabel 2. Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Wajo 2018-2020**

<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>		
<b>(Ribu Jiwa)</b>		
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>29,73</b>	27,48	27,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 2020

Tabel 2 menunjukkan pada tahun 2018-2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 2.250 Jiwa, kemudian pada tahun tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan yaitu sebanyak 210 Jiwa.

Secara umum, di Kabupaten Wajo didominasi oleh nelayan tradisional yaitu nelayan skala kecil dengan sarana penangkapan sebagian besar merupakan perahu tanpa motor dengan ukuran kecil atau nelayan pesisir danau. Hal ini sangat mempengaruhi hasil tangkapan dan secara langsung turut berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, di sisi lain

tidak semua nelayan memiliki sarana alat tangkap. Nelayan tradisional tersebut hanya melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehingga untuk mencapai dikatakan berdaya dan berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah masih belum optimal.

Peningkatan yang diharapkan saat ini dengan cara memberikan fasilitas dan kemudahan bagi nelayan dan pembudidaya ikan untuk mendapatkan bantuan fisik. Hal tersebut guna mendukung keberadaan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan di Kabupaten Wajo yang pada dasarnya memiliki wilayah pesisir yang luas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan nelayan yang tidak mendapat bantuan fisik untuk penangkapan ikan seperti bantuan mesin untuk perahu dan kurang meratanya informasi yang diperoleh masyarakat nelayan perihal kegiatan pelatihan dan program bantuan yang diadakan pemerintah. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana sebenarnya fungsi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah terkhusus Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo dalam pemberdayaan masyarakat pesisir danau tempe.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan, penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Wajo terkait Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan judul **Analisis Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat pesisir Danau tempe di Kabupaten Wajo.**

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Pemerintah Daerah (Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Danau tempe di Kabupaten Wajo?
2. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan perikanan) dalam fungsi pemberdayaan Masyarakat pesisir Danau tempe?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Wajo .
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Wajo.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Segi Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan jadi bahan acuan yang dapat berguna bagi seluruh stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap proses pemerintahan dalam pembangunan di Kabupaten Wajo.
3. Segi metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian masyarakat pesisir danau.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan untuk memperjelas juga menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam sehingga dapat memahami realitas yang ada. Konsep dan teori tersebut digunakan sebagai analisis terhadap masalah yang ada dan bersumber dari buku atau referensi lainnya. Berikut adalah tinjauan teoritis terkait analisis fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir danau yang penulis jabarkan yang nantinya digunakan dalam menunjang analisis masalah diteliti:

#### **2.1 Fungsi Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1 Fungsi Pemerintah**

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan suatu organisasi atau lembaga. adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus umum bahasa Indonesia (Badudu dan Sutan, 1966:412), mengemukakan "fungsi adalah jabatan atau kedudukan".

Fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan kehidupan, manusia masing-masing memiliki peran

dan fungsi, dalam melaksanakan perannya setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya pengantar Ilmu Administrasi Pembangunan (1985:17 dalam Syafi'ie 2004:6-7), Perencanaan serta fungsi terhadap pembangunan masyarakat tergantung pada beberapa hal, yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada Negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuhkembangkan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat.

Pada masa lampau, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire. Namun, ada pula Negara yang filsafat hidupnya menghendaki Negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandate untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan, ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah". Penyelenggara urusan pemerintahan dibagi berdasarkan criteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah

dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dari segala aspek. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas dan telah menjadi salah satu fungsi sebuah pemerintahan. Salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pandangan lain, pemerintah adalah “segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara” (Muhadam;2006, Ndraha, 1997;1). Apapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut sebagai representasi Negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya.

E.S. Savas (1982 :58 dan 1987:62 dalam Budiarto dkk, 2005:113), pelayanan pemerintah (government service) menunjuk pada penyediaan pelayanan oleh agen yang mempergunakan pegawai-pegawainya sendiri, dalam hal ini

pemerintah bertindak sebagai penyedia pelayanan (service arranger) sekaligus penghasil pelayanan (service provider), selanjutnya tugas pokok pemerintah adalah bagaimana memberikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer (fungsi pelayanan) dan fungsi sekunder (fungsi pemberdayaan). Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan. Sementara itu, fungsi sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

### **2.1.2 Pemerintah Daerah**

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintah berarti perkumpulan orang yang memiliki kebijakan tersendiri mengelola, memanager, serta mengatur jalannya suatu proses atau sistem pemerintahan. Atau dapat juga berarti sekumpulan orang yang secara bersama-sama memikul

tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Secara emilogis dapat diartikan sebagai “tindakan yang terus dan menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (E. Utrecht, 1986 :28).

Beberapa Negara lain berpendapat, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. Inggris menyebutnya government dan Prancis menyebutnya government, keduanya berasal dari perkataan latin gubernaculum dalam bahasa Arab hukumat, di Amerika disebut dengan Administration, sedangkan Belanda regering sebagai penggunaan kekuasaan Negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara, sebagai pengguna menetapkan perintah-perintah.

Edward Finer (Syafi'ie 2004 : 5) dalam bukunya yang terkenal Comparative Government, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (process), harus mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), mempunyai pejabat pemerintah (the duty) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (manner, method, and system) terhadap rakyatnya

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah; kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan

tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian pemerintah daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah ada Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung , nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang sejarah diatas, maka pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur

secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-hal ini terlihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para pendiri Republik mengadakan sidang-sidang dalam mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiannya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri dari atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan bahan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang gubernur.

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggungjawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggungjawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah Kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Menurut Harson , pemerintah daerah memiliki eksistensi sebagai:

1. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam menurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tanffa sendiri tingkat di atasnya:
2. Local State Government atau pemerintah lokal

administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-Pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Fungsi Pemerintah Daerah dapat di artikan sebagai perangkat Daerah menjalankan mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan, fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.

2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya sang Daerah;
3. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah, dengan hubungan tersebut memiliki wewenang, Keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya,

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, khususnya Pemerintahan Daerah sangat erat kaitannya dengan beberapa asas dalam Pemerintahan suatu Negara yakni desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Hal tersebut di jelaskan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 8, 9 dan 11 sebagai berikut;

1. Desentralisasi adalah pelimpahan sebagai Pemerintahan oleh Pemerintahan pusat kepada otonom dan berdasarkan asas Otonom.
2. Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintahan Pusat. Kepada instansi vertical di wilayah tertentu. Dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagai penunjang jawab urusan pemerintah umum.

3. Tugas pembantuan adalah pengurusan dan pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang meliputi Kewenangan Daerah Provinsi. Salah Satu Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan Perencanaan, pemanfaatan dan pengerjaan yang baik di harapkan bisa mengembangkan kualitas masyarakat sekitar serta mendorong kemajuan pembangunan daerah.

## **2.2 Pemberdayaan**

Pemberdayaan dalam artian sebagai kekuatan, maksudnya kekuatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mana dapat memberi kebebasan untuk mempertanggungjawabkan semua ide-idenya. Istilah pemberdayaan ini juga dapat di artikan sebagai upaya memenuhi

kebutuhan yang di inginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaan serta aktifitas sosialnya (Andhika dkk, 2014:56)

Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi di arahkan mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan yang di maksud oleh Rappaport di atas yaitu membantu mengarahkan suatu kelompok kerja dalam kegiatan sosial maupun kegiatan yang seseorang kerjakan, sehingga mereka dapat memiliki kesadaran tentang apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupannya karena mereka juga memiliki hak atas kehidupannya (Rappaport, 1984)

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhinya. Pemberdayaan disini menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan yang di maksud yaitu upaya seseorang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan maupun kelompok kerja yang ada untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam dirinya, jadi dalam kehidupan itu seseorang harus dapat berpartisipasi untuk mengetahui apa

kegiatan yang ada di dalamnya untuk memperbaiki kehidupannya (Parson et.al,1994:112-113)

Pemberdayaan juga menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Maka dari itu, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Hikmat, 2001:16)

Pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang mampu menjadi penentu pembangunan. Karena dalam kaitan ini usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Maka memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan mendirikan masyarakat (Suharto edi,2010).

Dijelaskan lebih lanjut dengan upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Pemberdayaan merupakan proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan dalam pelaksanaannya memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam

mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Harmen, 2018:17).

Berbagai pandangan tersebut terlihat jelas bahwa konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. Maka dari itu diambil rumusan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan rancangan pembangunan melalui proses pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang melibatkan seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat diberbagai bidang.

Target dan tujuan itu sendiri dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang digarap. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan di bidang pendidikan ataupun bidang sosial. Misalnya, tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil. Pada bidang pendidikan, memiliki tujuan agar kelompok sasaran dapat menggali berbagai potensi yang ada didalam dirinya dan memanfaatkan potensinya untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Sedangkan tujuan pemberdayaan pada bidang sosial misalnya agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan peran dan tugas sosial.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka bisa memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal, antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sebagaimana dikutip oleh Edi suharto, Pemberdayaan menurut Kieffer mencakup tiga dimensi yaitu kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan keberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan,

segenap usaha dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2005: 63-66) mengatakan Ada delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan, mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). Indikator keberdayaan, meliputi:

- a. Kebebasan mobilitas: Kemampuan seseorang untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas inidianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras gula, minyak goreng dan bumbu dapur; kebutuhan pribadi (sabun,sampo, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya: terlebih jika

ia membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- c. Kemampuan membeli komoditas besar: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti TV, HP, Kulkas. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga. Misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian hewan ternak memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: Responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja dirumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: Mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: Seorang dianggap berdaya, jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarga; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: Memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Fokus dan tujuan pemberdayaan untuk mengetahui secara operasional maka perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan, khususnya keberdayaan dalam bidang ekonomi masyarakat yang dapat menunjukkan seseorang atau masyarakat itu berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat, secara umum dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Secara lebih rincinya, menurut Gunawan Sumodiningrat, ada beberapa indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, yaitu:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.

- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain didalam masyarakat.
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial lainnya.

Pelaksanaan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang menghambat.
- b. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan

percaya diri agar dapat menunjang kemandirian masyarakat tertentu.

- c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidakimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok-kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan mendominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
- e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Kehidupan dan realitas dalam masyarakat sangat heterogen.

Begitu pula dalam masyarakat, keragaman karakter akan mempengaruhi

terhadap agen pemberdayaan dalam memilah dan memilih cara atau teknik ini tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan proses dan hasil dari kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Suharto, Dubois dan Miley menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk: merefleksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien atau sasaran, menghargai pilihan dan hak klien atau sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien.
- b. Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk menghormati klien atau sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien atau sasaran.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk: memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek, proses pemecahan masalah, menghargai hak hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan klien dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk: ketaatan terhadap kode etik profesi;

keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset dan perumusan kebijakan; penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Semua cara atau teknik diatas menunjukkan perlunya menempatkan sasaran pemberdayaan sebagai subjek yang memiliki keragaman karakter, potensi, dan kebutuhan. Masalahnya adalah bagaimana agen pemberdayaan dapat membangkitkan kesadaran dan motivasi klien atau sasaran agar mampu menggali potensi diri dan lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Strategi pemberdayaan, hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menurut Suyono, gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model. Suatu model cenderung harus membuat dulu sebuah model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar diberbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan penahanan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan serta cara atau pendekatan mereka. Dengan demikian model atau strategi pemberdayaan akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.

### 2.3 Masyarakat Pesisir Danau

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pinggir pantai, sungai, danau, rawa, waduk yang sebagian besar memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitan erat dengan karakteristik ekonomi wilayah, latar belakang budaya dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang (Wahyuddin, 2003)

Umumnya masyarakat pesisir memiliki budaya yang berorientasi selaras dengan alam sehingga teknologi memanfaatkan sumberdaya alam adalah teknologi adaptif dengan kondisi pesisir. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faizal (2002) masyarakat di wilayah pesisir memiliki pendidikan rendah, produktivitas yang sangat tergantung pada musim, terbatasnya modal usaha, kurangnya sarana penunjang, buruknya mekanisme pasar dan sulitnya transfer teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan pendapatan masyarakat pesisir menjadi tidak menentu.

**Tabel 4. Kondisi Spesifik Masyarakat Pesisir**

<b>Tipikal</b>	<b>Kondisi Spesifik</b>
Ekologis dan Geografis	Zona ekologi yang luas dengan luasan daerah yang dikelola relatif sempit. Aspek fisik lautan menyebabkan produktivitas yang tinggi dalam kegiatan suatu hari pelayaran. Adanya keterbatasan dalam transportasi laut, pelabuhan

	atau alternatif untuk mendapatkan bagian daratan. Berhadapan langsung dengan kondisi alam yang berbahaya seperti angin, arus air, dan berbagai masalah : malaria, kesulitan air bersih, banjir, kekeringan serta badai.
1	2
Ekonomi	Pendapatan umumnya di bawah standar nasional. Kesenjangan pendapatan diakibatkan oleh perbedaan sumber daya, tipe armada, alat tangkap dan akses pasar. Sumber daya yang berfluktuasi dan ketersediaan pasar menyebabkan variasi pendapatan dan ketidakpastian. Lokasi komunitas yang terisolasi membuat biaya tinggi dalam membangun dan memelihara infrastruktur.
Sosial	Akses ke pelayanan sosial terbatas, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Adanya intervensi orang luar untuk membentuk organisasi untuk <i>self-help</i> yang memberdayakan masyarakat perikanan seperti koperasi perikanan, kelompok nelayan, dan lain-lain. Keeratan hubungan dalam masyarakat yang cukup tinggi.

	Ketidaktergantungan pada hukum positif, umumnya masyarakat memiliki aturan lokal untuk memanfaatkan sumberdaya setempat.
--	--

Sumber : Hanson (1984) Diacu dalam Amanah, Fatchiya, dan Syahidah,  
2003

Definisi danau menurut para ahli, antara lain:

1. **Encyclopedia Britanica**, Danau adalah suatu badan air yang relatif besar yang bergerak perlahan atau genangan air yang menempati lembah pedalaman dengan ukuran yang cukup besar.
2. **USGS** (*United States Geological Survey*), Danau sebenarnya hanyalah komponen lain dari air permukaan bumi. Danau adalah tempat limpasan air permukaan dan rembesan air tanah menumpuk di titik rendah, relatif terhadap pedesaan di sekitarnya.

Perbedaan mencolok antara sungai dan danau adalah gerakan air, dan kecepatan gerakan air. Pergerakan air sungai lebih cepat dan terjadi di sepanjang tepian sungai, Sedangkan pergerakan air danau lebih tenang yang ditandai dengan imobilitas dan dapat diamati. Hal ini kemudian, menjadikan alasan mengapa masyarakat pesisir danau lebih dominan menggunakan rumah apung, dikarenakan arus air yang lebih tenang.

Masyarakat pesisir danau pada umumnya berprofesi sebagai nelayan, dimana nelayan didalam ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai mata pencahariannya. Arti nelayan dalam buku statistik perikanan Indonesia adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2006 Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya

melakukan penangkapan ikan.

Nelayan berdasarkan pengertian diatas adalah mengandung makna orang yang hanya melakukan pekerjaan, seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat/perlengkapan kedalam perahu/kapal, mengangkut ikan dari perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin, juru masak yang bekerja diatas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan (Statistik Perikanan Indonesia, 1995). Dari pengertian itu tersirat jelas, nelayan dipandang tidak lebih sebagai kelompok kerja yang tempat bekerjanya di air; yaitu sungai, danau atau laut. Karena mereka dipandang sebagai pekerja, maka kegiatan-kegiatannya hanya refleksi dari kerja itu sendiri dan terlepas dari filosofi kehidupan nelayan, bahwa sumber penghidupannya terletak berada diperairan.

Secara sederhana masyarakat nelayan memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat lainnya, diantaranya adalah:

- 1) Masyarakat nelayan memiliki sifat homogen dalam hal mata pencaharian , nilai dan kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku.
- 2) Cenderung berkepribadian keras.
- 3) Memiliki sifat yang toleransi dengan terhadap yang lainnya.
- 4) Memiliki gairah seksual yang relatif tinggi.
- 5) Hubungan sesama anggota lebih intim dan memiliki rasa tolong menolong yang tinggi.

6) Suara cenderung meninggi dalam berbicara.

Nelayan memiliki karakteristik sendiri menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat *open acces*. Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, yang dengan demikian elemen resiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang beresiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka.

Meskipun demikian, berdasarkan respon untuk mengantisipasi tingginya resiko dan ketidakpastian, nelayan pun dapat dibedakan kedalam dua kelompok menjadi nelayan besar (*large scale fisherman*) dan nelayan kecil (*small scale fisherman*). Perbedaan keduanya telah dijelaskan oleh Pollnac (1988) adalah: 1. Diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara-negara maju; 2. Secara relatif lebih padat modal; 3. Memberikan pendapatan lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu; dan 4) menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor. Nelayan skala besar dicirikan oleh besarnya kapasitas teknologi penangkapan ataupun jumlah armada dimana mereka lebih berorientasi pada keuntungan profit dan melibatkan buruh nelayan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan organisasi kerja yang kompleks.

Sementara itu, perikanan skala kecil lebih beroperasi di daerah kecil yang bertumpang tindih dengan kegiatan budidaya dan bersifat padat karya. Nelayan kecil juga bisa dilihat dari kapasitas teknologi (alat

tangkap dan armada) ataupun budaya dimana keduanya sangat terkait satu sama lain. Misalnya saja, seorang nelayan yang belum menggunakan alat tangkap maju (dayung, motor tempel, dan sebagainya) biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsistensi) sehingga sering disebut sebagai *peasant fisher*. Sebutan ini muncul karena alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (khususnya pangan) dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha (Priyanto Rahardjo, 2002).

## **2.4 Kerangka Konsep**

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peranan penting serta dituntut untuk menerapkan strategi yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya masyarakat pesisir melalui kebijakan atau program yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melihat kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi dan kelembagaan masyarakat pesisir danau. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 tahun 2016 tentang pengelolaan Danau Tempe pada Pasal 1 Ayat 13 “Pengelolaan danau adalah upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat”. Dalam melaksanakan perannya, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan tentunya akan dihadapkan dengan berbagai hambatan baik itu hambatan yang bersifat internal maupun eksternal dalam upaya memberdayakan masyarakat pesisir danau tempe di Kabupaten Wajo.

Gambar 1. Kerangka konseptual

